



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN UMUM

JALAN PANCORAN TIMUR II NOMOR 1, PANCORAN, JAKARTA SELATAN 12780 TELEPON(021) 79192438, 79192436;
FAKSIMILE (021) 7996109; SITUS: www.bppk.kemenkeu.go.id

NOTA DINAS
NOMOR ND-1720/PP.7/2022

Yth : 1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pembelajaran
2. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pembelajaran
3. Kepala Bidang Penjaminan Mutu Pembelajaran dan Sertifikasi
4. Kepala Bagian Tata Usaha

Dari : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum

Sifat : Biasa

Lampiran : Dua Berkas

Hal : Pengesahan dan Penyampaian Kerangka Acuan Program *E-Learning*
Pengenalan Tugas dan Fungsi Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian
Keuangan

Tanggal : 27 Juli 2022

Sehubungan dengan telah diselesaikannya penyusunan desain pembelajaran untuk *E-Learning* Pengenalan Tugas dan Fungsi Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2022, terlampir disampaikan Kerangka Acuan Program (KAP) *E-Learning* tersebut. Terkait proses penyusunan desain pembelajaran dimaksud, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan desain pembelajaran ini merupakan tindak lanjut hasil Analisis Kebutuhan Pembelajaran Strategis dari Biro Advokasi, Sekretariat Jenderal;
2. Penyusunan desain pembelajaran dilakukan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan nomor PER-4/PP/2017 dan PER-2/PP/2019;
3. Rapat Penyusunan Desain Pembelajaran *E-Learning* Dasar-Dasar Advokasi Hukum dan PJJ Advokasi Hukum diselenggarakan pada tanggal 21 Juli 2022 dan diikuti oleh perwakilan Pejabat/Pegawai Sekretariat Jenderal (Biro Umum dan Biro Advokasi) selaku *Stakholder* dan SGO, perwakilan Bidang/Bagian di lingkungan Pusdiklat Keuangan Umum, serta Widyaiswara Pengelola Program Pembelajaran terkait (Bapak Agus Suharsono);
4. Dengan memperhatikan *output* pembelajaran dan prasyarat kompetensi peserta, disepakati penyesuaian nama pelatihan menjadi *E-Learning* Pengenalan Tugas dan Fungsi Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
5. KAP tersebut berlaku untuk pelatihan dimaksud yang dimulai pada tanggal 10 Oktober 2022 secara *open access*.

Dalam rangka mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pusdiklat Keuangan Umum berkomitmen untuk memberikan pelayanan dengan BAHAGIA (Bersih, Akuntabel, Harmonis, Gesit, Inovatif, dan Adaptif).

Atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik
Heni Kartikawati

Tembusan:

1. Agus Suharsono
2. Kepala Subbidang Program Pembelajaran dan Perencanaan
3. Sertifikasi Kepala Subbidang Desain Pembelajaran





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN UMUM**

JALAN PANCORAN TIMUR II NOMOR 1 PANCORAN, JAKARTA SELATAN
TELEPON (021) 7996109; FAKSIMILE (021) 7996109; SITUS <http://www.bppk.kemenkeu.go.id>

LEMBAR PENGESAHAN DESAIN PEMBELAJARAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Heni Kartikawati
NIP : 19701218 199603 2 001
jabatan : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum

dengan ini menyatakan bahwa desain pembelajaran untuk program sebagai berikut,

nama program : *E-Learning* Pengenalan Tugas dan Fungsi Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian Keuangan

deskripsi : *E-Learning* ini dimaksudkan untuk memberikan pengenalan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Keuangan terkait konsep, tata cara, persyaratan, hak dan kewajiban dalam menjalankan fungsi advokasi (bantuan hukum) di lingkungan Kementerian Keuangan.

Materi pembelajaran pada pelatihan ini mencakup pengantar fungsi advokasi di lingkungan Kementerian Keuangan; Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Keuangan; Permohonan Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi; Pendampingan Hukum; Telaahan Hukum dan Rekomendasi Hukum; dan E-Advokasi. Untuk mengukur peningkatan pengetahuan, peserta akan dievaluasi melalui tes formatif di setiap akhir mata pelajaran.

Adapun desain pembelajaran dirancang dengan menggunakan metode *open access full e-learning (asynchronous e-learning)* dalam rangka optimalisasi akses bagi peserta pelatihan di lingkungan Kementerian Keuangan sehingga kegiatan pengembangan SDM dalam kondisi *New Normal* dapat tetap berjalan.

jumlah hari : 7 hari efektif

jumlah jam pelajaran : 21 JP

dapat digunakan sebagai desain pembelajaran di lingkungan Pusdiklat Keuangan Umum.

Jakarta, 27 Juli 2022

Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan



Ditandatangani secara elektronik
Heni Kartikawati



KERANGKA ACUAN PROGRAM

NAMA PROGRAM	
E-Learning Pengenalan Tugas dan Fungsi Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian Keuangan	
D E S K R I P S I P R O G 	TUJUAN PROGRAM
	<p><i>E-Learning</i> ini dimaksudkan untuk memberikan pengenalan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Keuangan terkait konsep, tata cara, persyaratan, hak dan kewajiban dalam menjalankan fungsi advokasi (bantuan hukum) di lingkungan Kementerian Keuangan.</p> <p>Materi pembelajaran pada pelatihan ini mencakup pengantar fungsi advokasi di lingkungan Kementerian Keuangan; Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Keuangan; Permohonan Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi; Pendampingan Hukum; Telaahan Hukum dan Rekomendasi Hukum; dan E-Advokasi. Untuk mengukur peningkatan pengetahuan, peserta akan dievaluasi melalui tes formatif di setiap akhir mata pelajaran.</p> <p>Adapun desain pembelajaran dirancang dengan menggunakan metode <i>open access full e-learning (asynchronous e-learning)</i> dalam rangka optimalisasi akses bagi peserta pelatihan di lingkungan Kementerian Keuangan sehingga kegiatan pengembangan SDM dalam kondisi <i>New Normal</i> dapat tetap berjalan.</p>
	KEBUTUHAN STRATEGIS UNIT PENGGUNA YANG AKAN DICAPAI
	<p><i>E-learning</i> ini didesain untuk memenuhi hasil AKP Strategis unit Biro Advokasi, Sekretariat Jenderal, dalam rangka meningkatkan pengetahuan pegawai di lingkungan Kemenkeu terkait dengan urgensi tugas dan fungsi Advokasi Hukum. Program ini dapat menjadi bagian pembelajaran jabatan guna pengembangan kompetensi pegawai yang bertugas di lingkup Advokasi Hukum.</p>
	SASARAN (TARGET LEARNERS)
Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya yang memerlukan pengetahuan terkait dengan tugas dan fungsi advokasi hukum di lingkungan Kementerian Keuangan.	
MODEL PEMBELAJARAN	
	<p><input type="checkbox"/> TATAP MUKA (TM)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> NON TATAP MUKA (NTM)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <i>E-Learning (full asynchronous)</i></p>

	<input type="checkbox"/> Bimbingan di tempat Kerja <input type="checkbox"/> Pelatihan Jarak Jauh <input type="checkbox"/> Magang <input type="checkbox"/> Pertukaran PNS dengan Pegawai swasta <input type="checkbox"/> Lainnya.....
STANDAR KOMPETENSI	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerangkan konsep keadvokasian di lingkungan Kementerian Keuangan; 2. Menjabarkan tata kelola penanganan perkara di lingkungan Kementerian Keuangan (Perdata, TUN, Praperadilan); 3. Menjabarkan penanganan perkara permohonan hak uji materiil di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi; 4. Menjabarkan tata kelola pemberian pendampingan hukum; 5. Menjabarkan tata kelola telaahan dan rekomendasi hukum; dan 6. Menjabarkan proses permohonan bantuan hukum melalui aplikasi E-advokasi. 	
KOMPETENSI DASAR	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerangkan konsep keadvokasian di lingkungan Kementerian Keuangan; <ol style="list-style-type: none"> a. menguraikan konsep bantuan hukum (keadvokasian); b. menjabarkan bantuan biaya penyelesaian masalah hukum; dan c. menguraikan urgensi kemenkeu satu dan <i>current issue</i> dalam fungsi keadvokasian. 2. Menjabarkan tata kelola penanganan perkara di lingkungan Kementerian Keuangan; <ol style="list-style-type: none"> a. menjabarkan <i>overview</i> proses peradilan indonesia (secara umum); b. menguraikan konsep hukum acara perdata; c. menguraikan konsep hukum acara TUN; dan d. menguraikan konsep praperadilan. 3. Menjabarkan penanganan perkara permohonan hak uji materiil di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi; <ol style="list-style-type: none"> a. menggali urgensi uji materiil terkait dengan produk hukum; b. menjabarkan hak uji materiil di mahkamah agung; dan c. menjabarkan hak uji materiil di mahkamah konstitusi. 4. Menjabarkan tata kelola pemberian pendampingan hukum; <ol style="list-style-type: none"> a. menguraikan konsep dan urgensi pendampingan hukum; b. mencontohkan jenis-jenis pemberian bantuan hukum; c. menjabarkan proses dan tata kelola pendampingan hukum; dan d. menafsirkan hak saksi, kewajiban saksi dan rehabilitasi. 5. Menjabarkan tata kelola telaahan dan rekomendasi hukum; <ol style="list-style-type: none"> a. menguraikan urgensi telaahan dan pendapat hukum; b. mencontohkan konsep telaahan dan pendapat hukum; c. mencontohkan konsep rekomendasi hukum; dan d. mencontohkan telaahan dan pendapat serta rekomendasi hukum; 	

6. Menjabarkan proses permohonan bantuan hukum melalui aplikasi E-advokasi;
- menguraikan urgensi penggunaan aplikasi e-advokasi; dan
 - mencontohkan proses permohonan bantuan hukum melalui aplikasi e-advokasi.

LAMA PELATIHAN EFEKTIF DAN DAFTAR MATA PELAJARAN

No.	Kegiatan	Nama Mata Pelajaran	Jam Pelajaran			Sekuen /Urutan
			TM	NTM	TOTAL	
1	Mata Pelajaran Pokok	a. Pengantar Fungsi Advokasi di lingkungan Kemenkeu	-	3	3	1
		b. Penanganan Perkara di Lingkungan Kemenkeu	-	8	8	2
		c. Permohonan Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi	-	3	3	3
		d. Pendampingan Hukum	-	3	3	4
		e. Telaahan Hukum dan Rekomendasi Hukum	-	2	2	5
		f. E-Advokasi	-	2	2	6
2	Mata Pelajaran Penunjang	-	-	-		
3	Ceramah	-	-	-		
4	PKL	-	-	-		
5	Outbound	-	-	-		
6	MFD	-	-	-		
7	Pengarahannya Program	-	-	-		
8	Action Learning	-	-	-		
TOTAL JP			21 JP			
LAMA WAKTU UJIAN			20 menit per Mata Pelajaran			
DILAKSANAKAN DALAM (HARI EFEKTIF)			7 hari efektif			
<input checked="" type="checkbox"/> Studi Mandiri : 7 <input type="checkbox"/> Tatap Muka : - <input type="checkbox"/> Action Learning : -						
JENIS DAN JENJANG PROGRAM						
<i>E-Learning</i> Pengenalan Tugas dan Fungsi Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian Keuangan ini berjenjang dasar.						
PERSYARATAN PESERTA						
Administrasi						

Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya yang bertugas dan/atau diproyeksikan untuk bertugas di unit yang terkait dengan hukum, dan/atau litigasi.

Lain-lain

1. Membekali diri dengan perangkat keras dan perangkat lunak yang diperlukan selama proses pembelajaran (*Desktop Computer*, PC, Laptop); dan
2. Memiliki akses jaringan internet selama proses pembelajaran.

KUALIFIKASI PENGAJAR

Umum

1. Pendidikan formal (minimum) Strata 1;
2. Mempunyai pengalaman mengajar;
3. Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Umum.

Khusus

1. Menguasai materi yang akan diajarkan/memiliki keahlian tertentu khususnya mengenai bantuan hukum dan pemberian bantuan biaya penyelesaian masalah hukum sesuai PMK No. 158/PMK.01/2012 dan PMK No. 159/PMK.01/2012 atau peraturan lain yang berlaku;
2. Mempunyai kemampuan dalam mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada peserta atau telah mengikuti TOT.

Catatan:

Kualifikasi pengajar ini diperuntukkan bagi **moderator/pengajar/narasumber** yang akan memandu diskusi (terutama menjawab pertanyaan peserta terkait substansi) pada “Forum” di *Kemenkeu Learning Center* dan/atau memberikan tatap muka (*online*) kepada peserta melalui “*Web-Seminar/Video Conference*”.

BENTUK EVALUASI

EVALUASI LEVEL 1

Evaluasi Penyelenggaraan dan Evaluasi Pengajar untuk program *e-learning* yang dilakukan secara *online*.

EVALUASI LEVEL 2

Bersifat Non-Kelulusan, dengan tes Formatif di setiap akhir Mata Pelajaran dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Waktu pengerjaan tes adalah selama **20 menit** untuk setiap Mata Pelajaran;
2. Untuk setiap Mata Pelajaran, peserta wajib menyelesaikan tes dengan **nilai minimal 80** (skala 100) sebelum dapat melanjutkan ke materi selanjutnya;
3. Peserta diberikan kesempatan untuk melakukan **retake 20 kali**;
4. Jumlah soal untuk setiap materi adalah sebagai berikut:

No	Mata Pelajaran	Jumlah Soal
1	Pengantar Fungsi Advokasi di lingkungan Kemenkeu	10
2	Penanganan Perkara di Lingkungan Kemenkeu	20
3	Permohonan Hak Uji Materiil di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi	10
4	Pendampingan Hukum	10
5	Telaahan Hukum dan Rekomendasi Hukum	10

6	E-Advokasi	10
EVALUASI LEVEL 3		
-		
EVALUASI LEVEL 4		
-		
FASILITAS		
<ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Online materials</i> 2) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembelajaran 3) Petunjuk Penggunaan <i>Kemenkeu Learning Center (KLC)</i> 4) Lain-lain: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>E-Learning</i> Pengenalan Tugas dan Fungsi Advokasi Hukum di Lingkungan Kementerian Keuangan ini merupakan program pembelajaran yang seluruhnya dilakukan secara <i>online</i>. b. Adapun ketentuan penyelesaian rangkaian pembelajaran <i>e-learning</i> ini adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Peserta wajib menyelesaikan 100% materi <i>e-learning</i>; ✓ Untuk setiap materi, peserta wajib menyelesaikan Tes Formatif dengan nilai minimal 80; ✓ Peserta diberikan kesempatan untuk melakukan <i>retake</i> sebanyak 20 kali. 5) Peserta wajib memberikan <i>review</i> untuk program <i>e-learning</i> yang diselesaikan melalui <i>course reviews</i> di KLC 		

Keterangan:

E-Learning ini merupakan program baru Pusdiklat Keuangan Umum di Tahun Anggaran 2022 sebagai hasil AKP Strategis Biro Advokasi. Desain pembelajaran telah dibahas dan disepakati pada Rapat Penyusunan Desain Pembelajaran *E-Learning* Dasar-Dasar Advokasi Hukum dan PJJ Advokasi Hukum yang diselenggarakan secara *virtual* pada tanggal 21 Juli 2022 dan diikuti oleh perwakilan Pejabat/Pegawai Sekretariat Jenderal (Biro Umum dan Biro Advokasi) selaku *Stakholder* dan SGO, perwakilan Bidang/Bagian di lingkungan Pusdiklat Keuangan Umum, serta Widyaiswara Pengelola Program Pembelajaran terkait (Bapak Agus Suharsono). Adapun finalisasi desain pembelajaran dilakukan melalui koordinasi lebih lanjut dengan Widyaiswara Pengelola Program Pembelajaran terkait. (CHY)

Jakarta, 27 Juli 2022
Kepala Pusat Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan Umum



Ditandatangani secara elektronik
Henri Kartikawati